

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem otonomi daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah ada banyak sumber pendapatan yang dapat diperoleh, termasuk sumber pendapatan daerahnya adalah pajak daerah. Peran dari pajak itu sendiri terlihat dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dengan adanya ini, untuk meningkatkan penerimaan daerah maka telah terbit dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>2</sup>

Pajak daerah sangat potensial dalam sisi menyumbang untuk penerimaan daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah, yang mana penerimaan tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum. Definisi pajak daerah merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada daerah yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dimana dalam pelaksanaan secara imperatif berdasarkan dasar hukum Pajak Daerah yang berlaku, yang

---

<sup>2</sup> Nopyandri, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum *"Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, Volume 5 No 1, Agustus 2014-Januari 2015, hlm.8.

pengelolaannya untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>3</sup>

Berdasarkan kutipan Jurnal Penelitian Akuntansi dan Perpajakan Vol. 3, No. 1, Menurut Miladia (2010) Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.<sup>4</sup>

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu dalam Setiana., dkk (2010) merupakan kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dinyatakan benar. Surat pemberitahuan (SPT) diajukan dan jumlah pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.<sup>5</sup>

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak dalam melaporkan omsetnya perbulan sesuai dengan kondisi yang ada dan membayar pajaknya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pihak fiskus ataupun instansi mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Himbauan kepada wajib pajak mengenai pengertian pajak daerah serta pensosialisasian mengenai pemanfaatan sistem TI pajak daerah.

Kegiatan Sosialisasi perpajakan menurut Saragih (2013) merupakan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi,

---

<sup>3</sup> Achmad Sani Alhusain, dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm 21.

<sup>4</sup> Jurnal Penelitian Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 3, No. 1

<sup>5</sup> *Ibid*

dan pembinaan kepada masyarakat luas khususnya segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.<sup>6</sup> Kegiatan ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman mengenai pajak namun juga berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar. Dari kegiatan ini dapat menstimulus kepatuhan wajib pajak sesuai yang diharapkan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 pasal 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap wajib pajak untuk digunakan tindak lanjut Surat himbauan<sup>7</sup> yang diterbitkan untuk meminta wajib pajak memberikan penjelasan yang benar atas kegagalan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan, ini berfungsi untuk menegaskan kembali atau mengingatkan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan. Surat imbauan ini mirip dengan surat peringatan, surat pengaduan, dan surat permohonan.

Sedangkan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik menurut Triandis sebagaimana yang dikutip oleh Dewantara, pemahaman mengenai lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang terhadap penggunaan komputer, faktor sosial di lingkungan tempat kerja yang menggunakan komputer, kebiasaan seseorang saat menggunakan komputer, konsekuensi yang dirasakan seseorang yang diharapkan dari penggunaan

---

<sup>6</sup> C Pradista Riyana Putri, "Pajak Daerah" *Repository Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, dalam <https://e-journal.uajy.ac.id>, 2015, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 18.30 WIB.

<sup>7</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007

komputer, dan kondisi yang dimanfaatkan menggunakan komputer dan alat teknologi lainnya.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Doni P, S.Si, MM selaku Kasubid Pengolahan Data dan Informasi BPKAD Kota Blitar, Dengan terdapatnya kasus diatas, diadakan aktivitas Rapat bimbingan dan sosialisasi yang diundang wajib pajak daerah Kota Blitar, dimana pihak BPKAD membagikan surat undangan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti Rapat bimbingan menimpa uraian pajak daerah serta aktivitas sosialisasi PERWALI Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelayanan Pajak Daerah melalui Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana Sistem dan Transaksi Elektronik ini buat mempermudah orang melaporkan SPTPD secara online tanpa mengusik jam kerja dan wajib pajak diharapkan dapat membayar sesuai waktu yang ditetapkan, tidak hanya itu dengan terdapatnya aktivitas bimbingan dan Sosialisasi Wajib Pajak dapat lebih patuh lagi dan melaporkan SPTPD sesuai dengan keadaan yang ada.<sup>9</sup>

BPKAD adalah suatu badan institusi pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, keuangan, pengelolaan pembukuan, pelaporan dan pertanggung Jawaban keuangan Daerah BPKAD Kota Blitar, sesuai dengan peraturan

---

<sup>8</sup> Rizki yudhi dewantara, “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesesuaian Tugas–Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual Instansi Pemerintahan Perpajakan”, *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, vol. 8 no. 1, 2016, hlm. 3-4. dalam <https://studentjournal.ub.ac.id>.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Doni P, S.Si, MM, Tanggal 26 Oktober 2020 di kantor BPKAD Kota Blitar

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pembendaharaan dan keuangan daerah dalam pelaksanaan seluruh fungsi dan fungsi pelayanan.<sup>10</sup>

Dalam peraturan ketentuan umum dan prosedur Perpajakan Indonesia menjelaskan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah *self assessment*. Hal ini telah dilakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *Self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sistem ini tidak berlaku untuk semua pajak daerah karena karakteristik masing-masing pajak daerah tidak sama. Pemungut pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu: Self Assessment system, *Official assessment* System, dan Withholding System. Dalam hal ini *Self assessment* ialah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, dan *Official Assesment* ialah sistem pemungutan yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sedangkan *Withholding System* ialah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar bukan wajib pajak dan bukan otoritas pajak atau fiskus. Sistem ini juga dikenal dengan pemotongan pajak dan dianggap adil bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Dari ketiga sistem pemungutan Pajak diatas, Badan Pendapatan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota blitar menggunakan 2 sistem

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Ed.revisi-cet.4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 98-99.

pemungutan Pajak yaitu *self assessment system* dan *official assessment system*, yang mana meliputi Pajak hotel, Pajak reklame, Pajak parkir, Pajak restoran, Pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak lain-lain yang sah.

Selama masa pandemi covid-19 di Kota Blitar, Menurut Bapak Mashuda, S.E selaku Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak pada BPKAD Kota Blitar juga memberikan surat edaran mengenai pemberian insentif pajak daerah kepada wajib pajak tertentu seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Dalam surat edaran ini dijelaskan kepada wajib Pajak hotel, restoran, dan hiburan yang tidak memungut pajak pada konsumennya di beri kebebasan selama 3 Bulan yaitu masa pajak pada Bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2020, dan untuk wajib pajak parkir ditempat hiburan atau sekolahan juga diberi kebebasan dengan masa pajak pada Bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2020.

Sementara itu, wajib Pajak hotel, restoran, dan hiburan yang memungut pajak pada konsumennya diberi insentif berupa penundaan pembayaran untuk masa pajak pada Bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2020 sampai dengan paling lambat 31 Oktober 2020. Dengan adanya ini pendapatan daerah juga menurun, dimana realisasi pajak tidak bisa tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Salah satunya Pajak Hotel.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Mashuda, S.E Tanggal 08 Oktober 2020 di kantor BPKAD Kota Blitar

Pajak Hotel termasuk dalam jenis pemungutan pajak *self assessment* (pemungutan pajak bebas), dimana menurut Suandy (2011) pemungutan pajak bebas artinya wajib pajak yang menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang belum dibayar. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak diantaranya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang belum dibayar. Apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka akan dikenakan Surat Perintah Perjalanan Dinas.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang menyediakan jasa akomodasi / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Selain itu objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas

---

<sup>13</sup> C Pradista Riyana Putri, "Pajak Daerah..."

telepon, internet, pelayanan cuci, seterika, dan fasilitas sejenis lainnya yang sudah di sediakan atau dikelola pihak hotel.<sup>14</sup>

Tarif Pajak Hotel atau tarif yang harus dibayarkan pihak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari omsetnya per bulan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah* Bab IV.<sup>15</sup>

Berikut data Jumlah Wajib Pajak, Target dan Realisasi Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar.

**Tabel 1.1 Wajib Pajak Hotel**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP Hotel</b>	<b>WP Lapor SPTPD</b>	<b>Target Pajak Hotel setelah P-Apbd</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel PAD</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>
2016	17	17	557.599.173,00	693.901.334,00	124,44	25.959.707.141,99
2017	17	17	800.000.000,00	886.244.755,00	110,78	38.800.888.323,70
2018	17	17	848.222.720,00	1.004.623.397,00	118,44	40.551.989.785,42
2019	17	17	910.000.000,00	1.082.717.025,00	118,98	44.674.770.697,03
2020	20	20	543.000.000,00	441.034.900,00	81,22	26.554.914.334,40

Sumber: BPKAD Kota Blitar

Dari hasil tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Blitar pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 jumlah wajib pajak tetap, namun target dan realisasi pajak hotel meningkat. Pada Tahun

<sup>14</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi...*, hlm. 299-301.

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah* Bab IV Pasal 3 – 9.



2020 Jumlah wajib Pajak bertambah, karena diadakan sosialisasi lagi dan pihak petugas juga mendatangi hotel baru agar terdaftar sebagai wajib pajak, namun pada Tahun 2020 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak menurun dikarenakan suatu sebab salah satunya pada masa pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 secara umum Pemerintah Daerah memberikan insentif dan jika program ini berjalan maka pajak daerah pun juga berjalan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah:

1. Proses penerapan teori sosialisasi, himbauan, pemanfaatan teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada BPKAD Kota Blitar.
2. Dari data yang ada pajak hotel pada tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah wajib pajak hotel sebanyak 17 wp dan dalam sisi penerimaan pajak dan retribusi wajib pajak hotel yang disumbangkan PAD juga mengalami

kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 20, tetapi dalam sisi penerimaan pajak dan retribusi pajak hotel yang disumbangkan PAD mengalami penurunan.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar?
2. Apakah himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar?
3. Apakah pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar?
4. Apakah sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis pengaruh himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar.
4. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instansi, akademisi, dan pihak lain. Berdasarkan tujuan dari penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat berupa:

### **1. Kegunaan secara teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam memperkaya khazanah, keilmuan mengenai pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel.

### **2. Kegunaan secara praktis**

#### **a. Bagi lembaga**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan evaluasi agar lebih baik sistem kedepannya khususnya mengenai strategi yang di gunakan.

#### **b. Bagi pihak akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi pembelajaran atau wawasan mengenai studi kasus yang ada dari penelitian.

#### **c. Bagi peneliti selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sekaligus pengembangan penelitian yang akan datang. Sedangkan untuk masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemahaman pajak daerah terhadap wajib pajak dalam melaporkan SPTPD sesuai kondisi yang ada dan kesadaran membayar pajak tepat waktu sesuai UU yang berlaku.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat dimana variabel bebasnya adalah sosialisasi (X1), himbauan (X2), dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik (X3) Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel (Y). Sampel dan Populasi penelitian ini yaitu data wajib pajak hotel yang ada di BPKAD Kota Blitar. Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka peneliti hanya akan membatasi hal berikut:

1. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 dan dengan data yang didapatkan dari BPKAD Kota Blitar terbatas hanya tahun 2016-2020.
2. Dalam teori sosialisasi peneliti hanya akan meneliti mengenai sosialisasi langsung serta sosialisasi tidak langsung yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan di BPKAD Kota Blitar. Indikator yang digunakan seperti penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik.
3. Dalam teori himbauan peneliti hanya akan meneliti mengenai himbauan langsung dan himbauan secara tidak langsung yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan di BPKAD Kota Blitar. Indikator yang digunakan seperti memberikan surat pemberitahuan himbauan kepada wajib pajak, untuk penjelasan yang sebenarnya mengenai dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Dalam teori pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik peneliti hanya akan meneliti mengenai konsekuensi yang dirasakan, faktor sosial, perasaan individu, kondisi yang memfasilitasi dalam menggunakan sistem ini seperti Peningkatan fleksibilitas Aplikasi, Keberadaan aplikasi “Pada Move On”, Manfaat Aplikasi “Pada Move On” untuk wajib pajak, Pelatihan penggunaan sistem aplikasi, dan Sistem aplikasi ini untuk memudahkan wajib pajak daerah Kota Blitar dalam melaporkan omsetnya perbulan dan membayar pajak nya sesuai dengan kondisi yang ada.
5. Dalam teori kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel peneliti hanya akan meneliti mengenai kepatuhan wp *self assessment* hotel secara formal dan kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel secara material, seperti kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu, serta menghitung pajak nya sesuai kondisi yang ada.

Sehingga dalam penelitian ini hanya membatasi pada pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah atau biasa disebut dengan BPKAD Kota Blitar.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “pengaruh sosialisasi, himbauan, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada BPKAD Kota Blitar”, oleh karena itu, penulis memberikan penegasan dan juga penjelasan sebagai berikut:

#### a. Pengaruh

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan Pengaruh adalah kekuatan sikap atau stimulasi yang berpengaruh dalam pembentukan watak, pemikiran, kepercayaan, dan perbuatan seseorang.<sup>16</sup> Pengaruh dalam penelitian ini diartikan sebagai kekuatan yang timbul dari tiga variabel berupa sosialisasi, himbauan, dan juga pemanfaatan sistem teknologi data elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel pada badan pendapatan keuangan dan aset daerah Kota Blitar.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), ialah suatu kegiatan memberi pemahaman atau mengenalkan sesuatu kepada masyarakat,<sup>17</sup> dimana sosialisasi yang dilakukan di BPKAD Kota Blitar

---

<sup>16</sup> Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka), hlm. 256.

<sup>17</sup> C Pradista Riyana Putri, “Pajak Daerah” *Repository Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* dalam <https://e-journaluajy.ac.id/>, 2015, diakses pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 18.30 WIB.

untuk memberi pemahaman mengenai pajak daerah atau mengenalkan pajak daerah kepada masyarakat, kegiatan tersebut seperti penyuluhan secara langsung maupun sosialisasi tidak langsung misalnya melalui media cetak maupun elektronik.

c. *Himbauan*

Himbauan yang dimaksudkan yaitu memberikan surat pemberitahuan himbauan kepada wajib pajak, untuk penjelasan yang sebenarnya mengenai dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-170/PJ/2007.<sup>18</sup>

d. *Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Elektronik*

Pemanfaatan sistem teknologi informasi elektronik menurut Sutabri (2014) ini digunakan untuk memberi informasi yang akurat dan relevan serta untuk membuat data, termasuk dalam memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara lainnya.<sup>19</sup>

Harapan Penggunaan sistem aplikasi ini ialah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum khususnya wajib pajak, dan juga meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak, serta percaya terhadap administrasi perpajakan. Selain itu tujuan dari pemanfaatan sistem

---

<sup>18</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007.

<sup>19</sup> S Rahmadani, *Pemanfaatan Teknologi Informasi*, dalam <http://repository.unpas.ac.id>, 2015, diakses pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00 WIB



teknologi informasi elektronik dapat menyingkat waktu, mudah, akurat dan mengurangi penggunaan kertas untuk dokumen-dokumen, Serta memudahkan pegawai pajak dalam memproses dan mengolah data yang didapat.

Pada Badan BPKAD Kota Blitar memperkenalkan Aplikasi “PadaMoveOn”, Aplikasi ini untuk memudahkan wp daerah Kota Blitar dalam melaporkan omsetnya perbulan dan melakukan pembayaran pajak nya sesuai dengan kondisi yang ada. Khususnya wajib pajak Hotel.

e. Kepatuhan Wajib Pajak *Self Assessment*

UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia sangat jelas menyatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia ialah *sistem self assessment* (Sistem penilaian sendiri). Hal ini telah berjalan mulai reformasi perpajakan yang ada di Indonesia pada Tahun 1983.

Penetapan sistem ini juga diadopsi dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 dan UU Nomor 34 Tahun 2000. Dimana sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, memperhentikan, dan melaporkan pembayaran pajaknya yang belum dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan *Self assessment*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Ed revisi cet.4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 98-99.

Di sisi lain, dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak *self assessment* ialah kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya sendiri dengan tepat waktu, serta menghitung pajaknya sesuai kondisi yang ada.

## **2. Secara Operasional**

Berdasarkan pada penegasan konseptual, maka secara operasional tentang “Pengaruh Sosialisasi, Himbauan, Dan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Self Assessment* hotel pada BPKAD Kota Blitar” merupakan proses penerapan untuk menguji pengaruh positif dan signifikan maupun pengaruh positif atau negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *self assessment* hotel, yang berdampak terhadap pencapaian target dan realisasi pajak daerah Kota Blitar.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam menata skripsi, maka penulis akan mengelompokannya menjadi sebagian ayat serta di setiap bagian akan dibagi sub ayat dengan penataan penyusunan seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Kata pengantar bermuatan hal alibi serta cerminan periset mengutip topik tersebut, dan jadi referensi utama dalam tahap eksperimen. Pada bab pendahuluan nantinya mencakup: kerangka balik, kesimpulan permasalahan, tujuan riset, batas permasalahan, faedah riset, penerangan sebutan serta pernyataan penyusunan skripsi.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini memuat tentang tinjauan pustaka atau materi materi dari literatur serta buku atau riset tadinya yang ada hubungan dengan penelitian ini. Dalam bab ini meliputi: pajak daerah, sosialisasi, himbauan, pemanfaatan sistem TI, kepatuhan wp *self assesment*, hubungan teori antara sosialisasi dengan kepatuhan wp *self assesment*, hubungan teori antara himbauan dengan kepatuhan wp *self assesment*, hubungan teori antara pemanfaatan system TI kepatuhan wp *self assesment*, pemikiran Islam mengenai pajak, riset terdahulu, kerangka abstrak, mapping elastis, dan hipotesis pnelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat mengenai tata cara riset yang dipakai selaku pedoman atau dasar untuk memperoleh hasil penyelidikan yang maksimum. Meliputi jenis dan pendekatan survei, lokasi survei, informasi serta pangkal informasi, metode pengumpulan

informasi, alat survei, perolehan informasi, metode analisa informasi, serta pemeriksaan validitas informasi.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Ayat ini menarangkan hal penyajian data serta pemahaman informan atas pertanyaan pertanyaan yang diberikan atau hasil wawancara serta data yang diperoleh melalui pengamatan.

#### BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Ayat ini menarangkan atau menganalisis hal hasil dari penyajian data yang diperoleh, Tata cara analisa informasi yang dipakai ialah percobaan keabsahan, percobaan reliabilitas, percobaan anggapan klasik yang mencakup (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), percobaan regresi linier berganda, percobaan anggapan (uji *Ttest* dan uji *Ftest*), serta percobaan koefisien pemastian.

#### BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini menerangkan berhubungan dengan kesimpulan yang menjawab pertanyaan utama yang penulis selidiki dan membuat rekomendasi dari hasil analisis data yang bisa digunakan selaku masukan untuk pihak- pihak terpaut.